
**Analisis Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan PDRB
Pemerintah Kabupaten Merangin**

oleh:

***) Drs. Mahmud, M.E.**

***) Lita Dwi Nuranti, S.Mb., M.M.**

****)Dosen Tetap STIE Muhammadiyah Jambi**

Abstrak

Pengeluaran Pemerintah aplikasi dari kebijakan dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dan DPRD yang merupakan salah satu instrumen utama berupaya secara nyata dan terstruktur untuk menghasilkan APBD yang betulbetul mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di daerah sesuai dengan potensi masing-masing. Untuk melihat apakah daerah telah siap secara parsial untuk menyongsong otonomi daerah, antara lain adalah dengan melihat apakah sumber-sumber penerimaan APBD nya mampu menutup anggaran belanja daerah yang bersangkutan.

Kata Kunci : *APBD, Belanja Daerah, Kesejahteraan Masyarakat.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolok ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab. Otonomi daerah membawa dampak positif bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, tetapi tidak demikian dengan daerah yang miskin sumber daya alamnya, yang merupakan salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten/kota pada umumnya adalah terbatasnya dana yang berasal dari daerah sendiri (PAD), sehingga proses otonomidaerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya(Azis,1997).

Sejalan dengan hal tersebut maka keberhasilan pembangunan perkonomian dari suatu wilayah dan kinerjanya dapat diamati melalui beberapa indikator makro. Indikator makro tersebut dapat dianalisis melalui PDRB yang dapat didefinisikan sebagai penjumlahan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit wilayah/daerah tersebut dalam periode tertentu. Jadi PDRB adalah nilai tambah yang pengukurannya berdasarkan adanya aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang

diukur dengan besaran dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan juga sebagai indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Data PDRB juga dapat menggambarkan kemampuan daerah mengelola sumberdaya pembangunan yang dimilikinya, oleh karena itu besaran PDRB setiap daerah bervariasi sesuai dengan potensi yang dimiliki dan faktor produksi masing-masing daerah (Sukirno, 1978)

Kabupaten Merangin melalui sektor unggulan PDRB yang sebagai salah satu faktor pengaruh PAD. Kontribusi besar yang diberikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor-sektor unggulan seperti sektor perdagangan, restoran dan hotel, sektor pengolahan industri dan sektor Angkutan dan Komunikasi dimana Kabupaten Merangin didominasi oleh sektor-sektor unggulan tersebut.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Merangin ?
2. Berapa besar Pengaruh variable Pendapatan Asli Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Merangin?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Merangin .
2. Untuk menganalisis besar Pengaruh variable Pendapatan Asli Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Merangin .

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan pasal 157 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri perlu diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai

seluruh aktifitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, komponen tersebut berasal Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Keempat komponen PAD tersebut juga merupakan sumber-sumber keuangan daerah, oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber keuangan daerah. Sumber-sumber PAD merupakan bagian keuangan daerah - yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.

Proporsi Pendapatan Asli Daerah yang rendah, di lain pihak menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah (Pratiwi, 2007).

2. Konsep Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pengertian pajak daerah ditemukan dalam berbagai literatur maupun dalam Undang-undang yang mengatur tentang Pajak Daerah, antara lain dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 disebutkan pengertian Pajak Daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi/badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Retribusi Daerah merupakan suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan rumah tangga daerah yang relatif cukup besar, maka kepada daerah juga diberikan sumber-sumber pendapatan berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan UU No.32 Tahun

2004. Pengelolaan kekayaan daerah tersebut berasal dari perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Undang-Undang yang modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Perusahaan daerah dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu : *Pertama*, Perusahaan asli daerah yaitu perusahaan daerah yang didirikan oleh daerah itu sendiri. Dan kedua, Perusahaan daerah yang berasal dari pemerintah atasannya. Perusahaan daerah sebagaimana dimaksud, pada dasarnya dibentuk dalam rangka turut serta melaksanakan pembangunan, dengan mengutamakan pembangunan daerah dengan memberikan jasa kepada masyarakat dan memberikan dukungan bagi ekonomi daerah.

Sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, selanjutnya disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, bahwa Lain-lain PAD yang sah meliputi : *Pertama*; hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, *Kedua*; jasa giro, *ketiga*; pendapatan bunga, *Keempat*; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan *Kelima*; komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/jasa oleh daerah. dari kelima komponen lain lain PAD tersebut merupakan sumber keuangan daerah dan masing-masing memberikan kontribusi bagi penerimaan PAD. Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan "Lain-lain PAD yang sah" antara lain penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah.

peningkatan PDRB maka hal ini mengindikasikan akan mendorong peningkatan pendapatan Asli daerah (saragih,2003). Pendapat ini sejalan dengan Hakim Halim (2000), bahwa Pendapatan Asli Daerah di pengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto.

4. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah seluruh pembelian atau pembayaran barang dan jasa untuk kepentingan nasional, seperti pembelian persenjataan dan alat-alat kantor pemerintah, pembangunan jalan dan bendungan, gaji pegawai negeri, angkatan bersenjata, dan lainnya (Samuelson, 1997).

Pengeluaran pemerintah daerah merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk laju investasi, meningkatkan kesempatan kerja,

memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata. Pada tingkat daerah, pengeluaran pemerintah atau belanja daerah tercermin pada anggaran dan belanja daerah (APBD) yang memuat semua biaya yang akan digunakan untuk menutupi semua belanja daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah sehari-hari ataupun pelaksanaan pembangunan daerah.

Untuk meningkatkan optimalisasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini APBD secara efisien dan efektif, maka struktur APBD untuk tahun 2003 terjadi perubahan yakni disusun berdasarkan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja atau output dan bukan lagi pada input seperti kecenderungan sebelumnya.

5. Hubungan antara PDRB dan Pengeluaran Pemerintah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hubungan antara PDRB dengan PAD merupakan hubungan secara fungsional, karena pajak daerah merupakan fungsi dari PDRB, yaitu dengan meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah dari pajak daerah. Selanjutnya dengan bertambahnya penerimaan pemerintah akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. Begitu juga sebaliknya dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya.

6. Hubungan pengeluaran Pemerintah dengan PAD

Menurut (Murdusmo, 2004) Optimalisasi penerimaan PAD harus didukung dengan upaya peningkatan kualitas layanan publik. Berbagai belanja yang dialokasikan pemerintah hendaknya yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan retribusi. Masyarakat lebih mudah membayar retribusi daripada membayar pajak. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan publik tidak mengalami peningkatan. Pemerintah daerah harus mampu menjalankan rumah tangganya sendiri secara mandiri.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini bersifat Kuantitatif merupakan data time series dari tahun 2002-2012. Tentang Pendapatan Asli Daerah,

Pengeluaran Pemerintah dan PDRB yang didapat dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Merangin, perpustakaan, literatur-literatur/buku-buku dan laporan-laporan yang berkaitan dengan penulisan ini.

1. Metode Analisis

Untuk menjawab tujuan penelitian yang pertama digunakan laju pertumbuhan masing-masing variable penelitian, yang di kemukakan oleh Arsyad (2009) digunakan rumusan sebagai berikut :

$$Gx = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

GX = Laju pertumbuhan variable penelitian per tahun

X_t = Realisasi data variable penelitian tahun tertentu

$X_{(t-1)}$ = Realisasi data variable penelitian tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui sejauh mana perkembangan masing-masing variable penelitian berdasarkan presentase yang diketahui.

2. Analisis Regresi

Model analisis regresi ini dipilih karena untuk mengetahui besarnya pengaruh dari perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya yang ada di dalam analisis tersebut ditentukan suatu persamaan yang menaksir sifat hubungan fungsional diantara variabel-variabel yang akan diteliti.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linear berganda, yaitu untuk mengetahui hubungan dan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap variabel terikat pengeluaran pemerintah digunakanlah formula sebagai berikut: $Y=f(X_1, X_2)$

Dimana:

Y = Pengeluaran Pemerintah

X_1 = PDRB

X_2 = PAD

$$\text{Log}Y = \alpha + \beta_1 \text{Log}X_1 + \beta_2 \text{Log}X_2 + \mu_i$$

Keterangan :

i = observasi ke i

μ = Kesalahan yang disebabkan faktor acak (x = Konstanta)
 Y = Pengeluaran Pemerintah
 X_1 = PDRB
 X_2 = PAD
 $\beta_1 \beta_2$ = Parameter elastisitas

Alasan dipilih bentuk fungsi logaritma adalah :

- 1) Koefisien regresi menunjukkan elastisitas
- 2) Untuk mendekatkan skala data sehingga terhindar dari heteroskedastisitas

3. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya dimaksudkan untuk membuktikan secara statistik bahwa keseluruhan variabel independen berpengaruh secara bersama-sama atau secara keseluruhan terhadap variabel dependen.

Langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan formulasi H_0 dan H_A

$H_0 : b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6 = 0$, artinya tidak ada pengaruh dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

$H_a : b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6 \neq 0$, artinya ada pengaruh dari variabel independent secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

- 2) Tes Statistik

Jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen (X) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y).

Jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$, maka H_0 diterima dan H_A ditolak, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen (X) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y). Menurut Gujarati (2003) nilai F dirumuskan dengan:

$$\text{dengan: } F = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Dimana:

R^2 : Koefisien determinasi

k : Jumlah variabel independen

n : Jumlah sample

4. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kebenaran model analisis regresi. Dimana apabila nilai R^2 mendekati 1 maka ada hubungan yang kuat dan erat antara variabel terikat dan variabel bebas dan penggunaan model tersebut

dibenarkan. Sedangkan menurut Gujarati (2003) koefisien determinasi adalah untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dinyatakan dalam persentase. Namun tidak dapat dipungkiri ada kalanya dalam penggunaan koefisien determinasi (R^2) terjadi bias terhadap satu variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Sebagai ukuran kesesuaian garis regresi dengan sebaran data, R^2 menghadapi masalah karena tidak memperhitungkan derajat bebas.

D. HASIL PEMBAHASAN

1. Analisis Perkembangan PDRB

Pendapatan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah tingkat tabungan masyarakat. Artinya, semakin besar jumlah pendapatan yang dapat diterima oleh masyarakat, maka akan semakin besar pula dana yang dapat dihimpun oleh pihak perbankan. Begitu pula sebaliknya, apabila tingkat pendapatan masyarakat menurun, maka kecenderungan untuk menabung juga akan semakin rendah.

Apabila ditinjau dari segi pendapatan, PDRB disebut regional income yang menunjukkan jumlah pendapatan (balas jasa) yang diterima oleh masyarakat karena keikutsertaannya dalam proses produksi. Pendapatan ini antara lain adalah: upah, sewa tanah (rent), bunga untuk modal (interest) dan sebagainya.

Perkembangan PDRB di Kabupaten Merangin dari tahun 2002-2012 dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Perkembangan PDRB Kabupaten Merangin Tahun 2002-2012

Tahun	PDRB (Jutaan Rupiah)	Perkembangan %
2002	741.825,21	-
2003	772.010,05	4,07
2004	809.472,10	4,85
2005	851.507,76	5,19
2006	892.418,59	4,8
2007	955.063,43	7,02
2008	1.012.318,88	5,99
2009	1.097.537,22	8,42
2010	1.183.697,85	7,85
2011	1.266.789,64	7,02
2012	1.798.187,64	41,9
Rata-rata	1.034.620.761	9,711

Sumber : BPS Kabupaten Merangin, 2013

Pada table 1, perkembangan PDRB terus mengalami peningkatan di mana awal periode pada tahun 2002 posisi PDRB Kabupaten Merangin adalah 7410.825,21 juta rupiah, kemudian pada tahun berikutnya yaitu tahun 2013 mengalami perubahan sebesar 4,07% atau mengalami peningkatan sebesar 772.010,05 juta rupiah. Tahun 2004 jumlah PDRB Kabupaten Merangin meningkat menjadi 809 472,10 juta rupiah atau mengalami perubahan sebesar 4,85 % bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2003, jumlah PDRB Kabupaten Merangin terus mengalami peningkatan hingga tahun 2012 yaitu sebesar 1.798.187,64 juta rupiah atau mengalami perubahan sebesar 41.9%.

2. Analisis Perkembangan Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Kabupaten Merangin dalam usaha untuk mengembangkan dan membangun daerahnya telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya sesuai potensi yang dimilikinya. Upaya tersebut dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten.

Tabel 2.
Perkembangan Realisasi PAD Kabupaten Merangin Tahun 2002-2012

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Rupiah)	Perkembangan %
2002	8.552.197.451	-
2003	9.376.417.023	9,638
2004	11.501.552.500	22,66
2005	12.913.484.485	12,28
2006	15.774.687.783	22,6
2007	14.179.962.330	-10,1
2008	19.418.107.000	36,94
2009	32.526.442.194	67,51
2010	27.512.053.170	-15,4
2011	38.325.106.169	39,3
2012	33.793.940.775	-11,8
Rata-rata	20.352.177.353	17,3188

Sumber : Dispenda Kabupaten Merangin, 2013

Berdasarkan tabel 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Merangin secara keseluruhan dapat dikatakan mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 pendapatan asli daerah menghasilkan pertumbuhan yang paling rendah yaitu hingga mencapai nilai negative 15,4 % atau sebesar Rp. 27.512.053.170. Sedangkan pertumbuhan yang tertinggi terjadi di tahun 2009 sebesar 67,51% atau sebesar Rp. 32.526.442.194.

3. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah daerah merupakan kebijakan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan instruksi menteri dalam negeri serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi anggaran tersebut mudah dilakukan. bisisi lain anggaran dapat pula menjadi saran bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 3.
Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Merangin
Tahun 2002-2012

Tahun	Realisasi Pengeluaran PAD (Rupiah)	Perkembangan %
2002	12.498.223.760	-
2003	22.216.713.260	77,76
2004	23.520.173.768	5,867
2005	24.322.408.678	3,411
2006	26.782.563.690	10,11
2007	32.813.319.9000	22,52
2008	45.809.054.670	39,61
2009	47.897.869.976	4,56
2010	54.965.924.979	14,76
2011	69.677.157.876	26,76
2012	72.213.830.640	3,641
Rata-rata	39.337.931.018	20,9

Sumber : Dispenda Kabupaten Merangin, 2013

Dari tabel 3. diatas, Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Merangin selama tahun 2002-2012 mengalami fluktuasi. Tahun 2003 merupakan tahun yang paling tinggi tingkat pertumbuhannya yaitu sebesar 77,76%, sedangkan tahun 2009 merupakan tahun yang paling rendah yaitu sebesar 4,56%. Pengeluaran pemerintah yang cenderung semakin meningkat ini seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah Kabupaten Merangin dari tahun ke tahun pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Merangin oleh pemerintah daerah semakin meningkat sehingga memicu meningkatnya pengeluaran pemerintah di Kabupaten Merangin.

4. Hasil Estimasi

Setelah memberikan gambaran umum mengenai perkembangan masing-masing variabel yang dimaksud dalam penulisan ini, maka pada bagian ini kita akan melihat hasil perhitungan empirik yang telah didapatkan dengan menggunakan perhitungan regresi dengan bantuan SPSS Windows. Tujuan dari perhitungan regresi

ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat signifikansi pengaruh antara variabel-variabel bebas yaitu PDRB dan PAD terhadap variabel terikat yaitu Jumlah Penduduk dan yang mana lebih dominan pengaruhnya.

Hasil Regresi

Tabel 4.
Hasil Pengujian Regresi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1. (Constant)	4.322	3.623		1.193	.267
PDRB	.648	.459	.308	1.413	.195
PAD	.691	.223	.675	3.096	0.15

Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

Dari tabel di atas dapat dibuat persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$\text{Log } Y = 4322 + 0,648 \text{ Log } X_1 + 0,691 \text{ Log } X_2$$

Dari persamaan diatas diperoleh konstanta sebesar 4,322 ini menyatakan bahwa jika PDRB (X_1), PAD (X_2) dianggap tetap atau tidak berubah ($X_{12} = 0$). Maka pengeluaran pemerintah sebesar 4,322 persen atau Rp. 4.322.000.000 pertahunnya.

Secara parsial arah hubungan variabel - variabel independen terhadap variabel dependent ditunjukkan oleh tanda dari koefisien regresi masing - masing variabel independent. Koefisien regresi dari PDRB (X_1) adalah 0,648 yang berarti bahwa terdapat hubungan yang positif antara PDRB dengan pengeluaran pemerintah, jika terjadi kenaikan PDRB Kabupaten Merangin (X_1) sebesar 1 % maka pengeluaran pemerintah Kabupaten Merangin juga akan meningkat sebesar 0,648 %.

Sedangkan koefisien PAD (X_2) adalah 0,691 yang berarti terdapat hubungan yang positif antara PAD dan pengeluaran pemerintah, jika terjadi kenaikan PAD sebesar 1 % maka akan meningkatkan pengeluaran pemerintah sebesar 0,691%.

E. Kesimpulan

1. Perkembangan Realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Merangin yang terus mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata selama periode penelitian sebesar 17,31%. karena sebagian besar realisasi penerimaan pajak daerah mencapai target

yang telah ditetapkan. dan sistem pengelolaan komponen PAD sudah berjalan secara optimal. Sedangkan pada perkembangan Realisasi pendapatan Domestic Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Merangin juga mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata selama periode penelitian sebesar 9,72%. Diiringi dengan perkembangan Realisasi pengeluaran pemerintah Kabupaten Merangin yang juga mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata selama periode penelitian sebesar 20,9%.

2. Dari hasil data yang telah diolah serta hasil perhitungan empirik yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan sebesar 3,096 terhadap pengeluaran Pemerintah Kabupaten Merangin. Sedangkan PDRB berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap Pengeluaran pemerintah Kabupaten Merangin dengan nilai t-hitung sebesar 1,413. Akan tetapi dari hasil uji-F diperoleh angka F-hitung sebesar 46,238 dan F-tabel sebesar 5,21. karena $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ ($46,238 > 5,21$) sehingga H_a diterima dan H_o ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independent (PDRB dan PAD) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent (pengeluaran pemerintah). Artinya setiap perubahan nilai variabel PDRB dan PAD akan menyebabkan perubahan pada jumlah pengeluaran pemerintah di Kabupaten Merangin.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiatmojo Dwi Gatot. 2003. Pembangunan Berkelanjutan Dengan Optimasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Untuk Membangun Perekonomian Dengan Basis Pertanian Di Kabupaten Musi Banyuasin, Jakarta
- Adi Dalam Wong, 2006, Pembangunan Infrastruktur. Bandung
- Aldeef, 1964. Keuangan Pemerintah Daerah. Jakarta: Rajawali
- Atep Adya Barata 2004. Pendapalan Asli Daerah, Terjemahkan Barata, Jakarta
- Damodar Gujarati, 1995. Ekonometrika Dasar, Terjemahan Sumarno Zain, Jakarta: Eriangga,
- Davey, 1988. Perpajakan Daerah.. Terjemahan Amarullah. Jakarta.
- Elita , 2007. Penerimaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Jakarta : Rajawali

Geodhart, C, 1982. Garis-Garis Besar Keuangan IVegara, Terjemahan-Ratmoko, Jambatan ; Jakarta

Koswara,1999. Komponen Pendapatan Asli Daerah . BPFE : Yogyakarta Kuncoro, 1995. Otonomi Daerah. Jakarta: Fokusmedia

Soemitro Rochmat, 1982, Pajak Daerah. Terjemahan Geodhart, Jakarta

Sabaran:H, 2002. Produk Domestik Regional Bruto. Jakarta: Rajawali

Syamsi,1998. Pendapatan Asli Daerah (PAD). Erlangga; Jakarta

Sukirno, 1995. Pertumbuhan Ekonomi. Jakarta ; Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Smeet, 1982, Pajak Daerah. Terjemahan Geodhart, Jakarta

Sodargo R. Retribusi Daerah. Terjemahan Geodhart, Jakarta

Suparmoko, 1987. Pengeluaran Pemerintah. Erlangga ;Jakarta

Prawiroharjo Sutrisno. 1988. Retribusi Daerah. Terjemahan Geodhart, Jakarta

Todaro, 1997. Pertumbuhan Ekonomi. Jakarta